

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini pendapat masyarakat direkayasa oleh suatu bangunan opini seolah-olah agama tidak boleh bersentuhan dengan politik. Bahkan agama menjauhi soal-soal politik. Pendapat ini harus kita tinjau kembali, mengingat agama justru menjadi sumber nilai dan moral yang dapat menjernihkan dunia politik yang mudah keruh oleh intrik kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Fitrah agama dan kenabian adalah untuk mengarahkan agar sumber daya sosial dan politik dapat bermanfaat dan dinikmati secara riil. Bukannya oleh pemegang kekuasaan tetapi juga oleh rakyat. Sejak kelahirannya, watak agama adalah menjelaskan soal-soal kehidupan. Dari soal keimanan dan keperibadatan, sampai kepada soal-soal kemasyarakatan dan keamanan. Mimbar kenabian secara tradisional telah berfungsi dan diterima sebagai tempat disuarakannya pengumuman dan pernyataan menyangkut ide kehidupan yang penuh keadilan dan kebenaran. Agama yang demikian itu bersifat tetap dan telah terbukti member sumbangan positif terhadap perjuangan bangsa meraih cita-cita menuju kemerdekaan dan menegakan kedaulatannya.¹

Kitab suci agama samawi, terutama al-Qur'an, memberi porsi cukup banyak untuk merekam pasang surut hubungan masyarakat dan agama melalui

¹Andi Mappetahang Fatwa, *Demokrasi Teitis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 257.

penuturannya yang dialektis tentang umat-umat terdahulu. Dari kisah nabi-nabi terdahulu dapat di ketahui pentingnya hubungan agama dan masyarakat dalam kebenaran ukuran pokok, sikap pengesahan terhadap tuhan. Sikap ini menjadi dasar hakiki dari eksistensi beragama yang paling *universal* yang tidak mengenal batas waktu maupun nama kelembagaan resmi keumatan dan kenabian. yang menarik, ukuran kebenaran sikap keberagamaan *universal* itu telah diletakan para pendiri republik kita (*the foundings father*) sebagai falsafah Negara pada sila pertama pancasila. para pendiri bangsa secara langsung memberikan landasan yang benar dalam upaya mengatur hubungan agama dan masyarakat ke bangsa Indonesia. Perlu kita sadari bahwa masyarakat kebangsaan seperti yang kita kenal sekarang ini memang usianya masih *relative* singkat bila kita mengacu pada perkembangan ide negara–bangsa (*nation state*) yang lahir awal abad ke-20. Tidak jarang kita terperangkap dalam kerancuan konseptual antara “bangsa “(*nation*) yang menekankan pada identitas social dan konsep”masyarakat”(*society*) yang mengacu pada formasi social. Begitu pula dengan konsep “Negara”(*state*) yang mengacu pada konsep politik (organisasi kekuasaan) serta konsep “negeri” (*country*) yang menunjuk pada konsep *geografis* (lokal tempat tanah air).²

Dunia politik sering dikatakan sebagai dunia kotor, penuh intrik, pertentangan, tipu muslihat dan lain-lain. Semua itu ada benarnya. Kehidupan memang tidak satu warna. Tetapi tentang kekotoran dunia politik dan aktivis politik, tidak sepenuhnya benar. Yang sepenuhnya benar justru mereka yang tidak mengenal dunia politik, tidak memiliki kesadaran politik, hak-hak politik dan

²*Ibid.* hlm. 158.

perjuangan politik, dipastikan akan berada dalam urutan terbawah sebagai pihak penderita. Mengenai kotor tidaknya politik kiranya sangat ditentukan dari segi pemihakan. Apakah artikulasi politik itu berpihak pada suara keadilan dan kebenaran, atau sebaliknya mengarahkannya untuk kezaliman.³

Peran Islam di negeri kita pada tingkat praktis ialah bagaimana menjadikan pembangunan nasional lebih berhasil. Terutama berkaitan dengan tumbuhnya kemampuan bangsa untuk sejauh mungkin mendorong partisipasi seluruh kekuatan dan partisipasi bangsa, baik yang berupa faktor manusia (SDM), Faktor *capital* (dana) maupun faktor alam. Itu semua berarti menghendaki bahwa demokrasi harus jalan sesuai amanat UUD 1945. Dalam rangka menjalankan perannya itu Islam sering berada dalam situasi dan kondisi berbeda akibat interaksi politik antar kekuatan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Umat Islam bergerak karena kesadaran, tidak karena keuntungan-keuntungan material, seperti kekuasaan politik, kepentingan kelas, atau kepentingan-kepentingan golongan. Dalam sebuah hadis yang di tuturkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah saw berkata, ”*sesungguhnya amal itu tergantung niatnya*”.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.”⁴

³Ibid.hlm. 164.

⁴Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadits yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari (orang Bukhara) dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling shahih di antara semua kitab hadits. (Hadits riwayat Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari ‘Umar bin Al Khottob).

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, juga diyakini mengandung kajian mengenai masalah politik dan keagamaan.⁵Keterkaitan agama Islam dengan aspek politik dapat dirujuk ulang pada persoalan pertama yang timbul dalam Islam, menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan persoalan politik.⁶

Setiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya.Barang siapa berhijrah demi Allah dan Rosulnya, maka hijrahnya itu dinilai sebagai demi Allah dan Rosulnya. Barang siapa hijrahnya itu demi dunia yang selalu di cari atau demi wanita yang akan dikawini, maka hijrahnya dinilai sebagaimana yang menyebabkan.”Niat itu begitu penting, sehingga banyak buku hadis diawali dengan soal niat itu, Niat itulah yang menyebabkan hidup sebagai riwayat dari kesadaran.⁷

Ada tiga macam strategi yang diterapkan oleh umat islam selama ini. Ketiga strategi itu ialah *Struktur, Kultural, dan mobilitas social*.Sebuah hadis nabi dapat dipakai sebagai rujukan kearah strategi itu, “Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran,hendaklah dia mengubah dengan tangannya, jika tidak

⁵Ibn Khaldun berpendapat bahwa agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas dan jumlah penduduk. Sebabnya adalah karena semangat agama bisa meredakan pertentangan dari iri hati yang dirasakan oleh satu anggota dari golongan itu terhadap anggota yang lainnya, dan menuntun mereka ke arah kebenaran (Khaldun, 1976: 180) sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata dalam *Metodologi Studi Islam: Model Penelitian Politik* (2001: 267).

⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, (Jakarta: UI Press, 1979), cet. I, 92.Misalnya, ketika Nabi Muhammad saw berada di Madinah, bukan hanya mempunyai sifat *Rasulullah* , tetapi juga mempunyai sifat kepala negara. Dan sebagai kepala negara, maka setelah beliau wafat semestinya diganti oleh orang lain untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan. Para peneliti sejarah politik ada yang mengkategorikan bahwa corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad adalah corak teo-demokratis, yaitu suatu pola pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap persoalan terlebih dahulu melakukan musyawarah baru kemudian menunggu ketetapan dari Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena pada masa Nabi, wahyu masih dalam proses penurunan (Nata: 2001:270).

⁷Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan (Anggota IKAPI), 1997, hlm. 1.

mampu hendaklah dia mengubah dengan lidahnya, dan jika tidak mampu juga hendaklah ia mengubah dengan hatinya, yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman.”⁸

Islam itu adalah lebih dari sistem peribadatan. Ia adalah satu kebudayaan/peradaban yang lengkap dan sempurna. Yang dituju oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang, hingga meresap dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah dan perundang-undangan.⁹

Beberapa aspek teoritis dari pemikiran politik dan Negara Islam :

Pertama, karena bagaimanapun Islam tidak mengenal pemisahan agama dan politik. Dengan demikian, diperlukan tonggak-tonggak pengukur (*parameter*) yang jelas bagi pemikiran politik dalam pandangan Islam, agar proses berfikir kaum muslimin justru tidak menjadi gangguan bagi perkembangan negara-negara berkembang yang sedang merintis dan membangun tatanan negara yang mantap dan dapat berfungsi penuh untuk jangka panjang.

Sebab kedua adalah adanya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran tentang berbagai bidang kehidupan, termasuk tentang politik, dibutuhkan oleh masyarakat dalam era pembangunan, paling tidak untuk dijadikan kaca perbandingan bagi pengembangan teori-teori lain di luar pandangan Islam, termasuk teori-teori yang dibangun atas dasar *ideology* nasional pancasila, pada saat ini. Kenyataan ini adalah perkembangan sejarah yang tidak boleh diabaikan, karena hanya akan berakibat munculnya proses perbandingan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi belaka, dengan segala akibatnya dari *stabilitas*

⁸*Ibid.* hlm. 227.

⁹Saifuddin, A.M, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 177.

keadaan. Justru pengakuan akan pentingnya tonggak-tonggak pengukur itu akan menciptakan suasana *dialogis* yang diperlukan bagi pematangan pemikiran kita semua tentang Negara dan politik.

Sebab ketiga, dapat dilihat pada keharusan pemeliharaan keseimbangan antara keinginan pemikiran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sudah jelas bahwa untuk sebagian bidang kehidupan, kepada Islam telah diajukan tuntutan untuk merumuskan pandangan *positif* dan *konstruktif*. Paling tidak, untuk kepentingan memotivasi masyarakat agar menerima ajaran berkiprah dalam kegiatan pembangunan di bidang-bidang kehidupan tersebut.¹⁰ *Amar makruf nahi mungkar* merupakan tugas kemanusiaan yang telah diterima secara *universal*. Dalam Islam, *nahi mungkar* dapat *diaktualisasikan* dalam tiga bentuk yaitu, dengan tangan, dengan ucapan, atau dengan hati.¹¹

Islam pada masa Orde Baru ditandai dengan perubahan besar, baik secara institusional.¹² maupun dalam bentuk perubahan pemikiran.¹³ Di dalam

¹⁰Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur*, Yogyakarta : LKIS, 2010, hlm. 275.

¹¹Andi Mappetahang Fatwa, *Agama dan Negara*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 113.

¹²Perubahan institusional yang dialami oleh Islam pada masa Orde Baru adalah hancurnya institusi-institusi lama dan munculnya institusi-institusi baru. Perubahan institusi lama ialah terutama fusi partai-partai Islam yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973, kemudian lenyapnya partai Islam setelah PPP mengganti asasnya, Islam dengan Pancasila dalam muktamarnya tahun 1984. Sedangkan pemunculan institusi baru ditandai antara lain dengan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1975, lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tahun 1990 dan Bank Muammalat Indonesia (BMI) tahun 1991 (Tebba: 1993: xv).

¹³Dibidang pemikiran selama Orde Baru, Islam juga banyak mengalami perubahan, baik pada pemikiran klasik maupun munculnya pemikiran modern. Pemikiran klasik ini meliputi fikih (hukum Islam), teologi, tasawuf (*mistism*), dan timbulnya upaya untuk mendalami filsafat. Sedang perubahan pemikiran modern terlihat pada munculnya ilmu pengetahuan Islam dalam ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sosiologi, antropologi, dan psikologi, serta bidang-bidang pemikiran yang terkait dengan ilmu pengetahuan social dan kemanusiaan. Tebba, *Ibid.*, Berkembangnya intelektualisme Islam baru di Indonesia selama dua dekade terakhir dapat dianggap berawal dari krisis, dipengaruhi dan dibentuk oleh situasi politik Islam yang kurang menguntungkan dan akibat-

penelitiannya, Din Syamsuddin menyatakan bahwa Islam Indonesia dihadapkan pada kenyataan tentang kuatnya semangat pribumi (*indigenous*) di kalangan umat Islam sendiri yang tidak menghendaki “Islam Politik”. Mereka ini dominan di pentas politik nasional. Maka kemudian Islam tidak banyak dihadirkan di arena politik praktis untuk merebut kekuasaan, melainkan dalam dakwah, yang secara substansial juga mengandung muatan politik: *amar ma'ruf nahy munkar*. Perubahan dari Islam politik ke dakwah ini merupakan hasil intropeksi budaya, yang merupakan akibat dari hubungan tidak seimbang antara Islam dan negara: Islam berada pada posisi *inferior* sedangkan negara berada pada posisi *superior*.¹⁴

Dalam perkembangannya kemudian setelah banyak orang Islam yang berpendidikan, agama, dan umum, umat lalu mengalami suatu masalah baru tentang kesenjangan antara yang berpengetahuan agama dengan berpendidikan umum. Masalah ini membawa polarisasi dalam kehidupan politik, yakni antara mereka yang berafiliasi kepada partai Islam dengan orang-orang Islam yang tergabung dalam partai-partai politik yang tidak membawa bendera Islam. Selanjutnya, polarisasi politik menimbulkan dialog dan perdebatan di kalangan umat tentang perlu tidaknya membentuk negara Islam. Sebagian pihak di kalangan Islam menghendaki dibentuknya negara Islam, Namun, tidak sedikit pula terutama yang telah berpendidikan tinggi, tidak menghendaki adanya

akibat negatif yang ditimbulkannya terhadap para pemikir dan aktifisnya. Situasi yang tidak menggembirakan ini muncul terutama, meskipun tidak seluruhnya, karena hubungan politik yang tidak harmonis antara Islam dan negara serta hasil sintesa sosio-kultural dan politik antara keduanya yang tidak begitu tepat. Lihat, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, 115.

¹⁴M. Din Syamsuddin, *The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia*, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 1995.

Negara Islam,¹⁵ Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik (*unified paradigm*), paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), dan paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*).¹⁶

Politik ini berpengaruh pada munculnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam pada awal 1970-an. Salah satu inti gerakan ini adalah perlunya perwujudan integrasi umat dengan melihat kembali (memperbaharui) paham agama yang dianut umat Islam selama ini.¹⁷ Sedangkan wacana politik Islam pasca Orde Baru merupakan sebuah babak baru perjalanan sejarah setelah dalam beberapa dasawarsa mengalami eksperimentasi politik. Politik Islam pasca Orde Baru bukan merupakan “daur ulang” politik masa lampau, dalam pengertian muatan pembentukan pemerintahan Islam, tetapi berakar dari pilihan intelektual setelah mengalami *intellectual exercise*. Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang *integralistik* dengan yang substansialis. Yang ingin dikedepankan politik Islam pasca Orde Baru ini bukan keinginan untuk mewujudkan cita-cita lama, yakni mewujudkan Islam sebagai dasar negara, tetapi keinginan untuk mewujudkan prinsip-prinsip politik yang tertera dalam al-Qur’an. Demikianlah

¹⁵Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993, xvii.

¹⁶Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma berarti model dalam teori ilmu pengetahuan, kerangka berpikir. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 828.

¹⁷Tebba, *Ibid.*, xviii.

tansformasi perubahan artikulasi (institusional dan pemikiran keagamaan) Islam politik di Indonesia dalam dua sejarah.

Integrasi umat ini diwujudkan dengan menghilangkan perpecahan politik dan membangun kehidupan sosial baru yang yang maju di segala bidang. Karena kehidupan sosial yang sejahtera dan diridhoi Tuhan (*baldatun thayyibah wa rabbun ghafur*) merupakan substansi politik Islam. Sedang partai politik, parlemen, dan negara bukan tujuan politik Islam, tetapi hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari perbandingan di atas, Pemikiran Andi Mappetahang Fatwa akan sangat menarik untuk dikaji, Dengan pemikirannya yang ideal itu memberikan banyak sumbangsih pemikiran mengenai sistem *integrasi* politik dan agama. Setidaknya, pemikirannya bisa menjadi neraca perbandingan yang selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk diterapkan guna menciptakan politik yang serasi, selaras, dan seimbang, yaitu *Integrasi* Politik dan Islam. Menelaah pemikiran Andi Mappetahang Fatwa yang menarik itu mendorong penulis untuk meneliti kemudian menganalisis pemikirannya mengenai *Integrasi Politik dan Islam* dalam skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ANDI MAPPETAHANG FATWA TENTANG INTEGRASI POLITIK DAN ISLAM DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Andi Mappetahang Fatwa Tentang Integrasi Politik dan Islam?
2. Bagaimana Relevansi Terhadap Perkembangan Integrasi Politik dan Islam di Indonesia Menurut Andi Mappetahang Fatwa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan dan mengetahui point-point penting dari pemikiran Andi Mappetang Fatwa tentang Integrasi Politik dan Islam di indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pemikiran Andi Mappetahang Fatwa dengan perpolitikan di Indonesia.

Sedangkan manfaatnya dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi pemikiran politik dan Islam sebagai upaya memajukan Negara.
2. Mengenalkan khazanah intelektual klasik, terutama tentang ilmu politik dan Islam.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang mendeskripsikan pemikiran Andi Mappetahang Fatwa dalam tema yang berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhajir Arief Rahmani salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Hardiansyah dengan judul: "*Pemikiran, Pergerakan Dakwah dan Politik A. M. FATWA*". Pada intinya penulis skripsi tersebut menjelaskan bahwa menurut konsep Andi Mappetahang Fatwa, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip kehidupan politik yang harus diikuti oleh umatnya. Pengalaman Nabi Muhammad di Madinah, menunjukkan hal tersebut. Demikian pula, al-Qur'an menggariskan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal ini, paling tidak ada sejumlah prinsip etis yang telah digariskan, seperti prinsip keadilan (*al-adl*) prinsip kesamaan (*al-musawah*); dan prinsip musyawarah atau negosiasi (*syura*). Meskipun prinsip-prinsip yang dikemukakan ini jumlahnya sedikit, akan tetapi ajaran-ajaran itu dinyatakan secara berulang-ulang oleh al-Qur'an.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Deny Fresyen dengan judul: *Konsep Negara Dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Asad tentang Berdirinya Negara Islam)*. Menurut Muhammad Asad, pengertian negara Islam adalah negara yang di dalam konstitusinya memuat ketentuan syariat Islam sehingga dalam praktek ketatanegaraannya menjalankan norma-norma yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam pengertian Negara Islam ini, negara mempunyai tujuan agar kepada warganegaranya termasuk di dalamnya pemerintahan untuk sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, dan ajaran Islam masuk atau dimuat dalam

konstitusi negara tersebut, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya berpedoman pada konstitusi yang tertinggi. Muhammad Asad berpendapat bahwa syarat negara itu bisa disebut Negara Islam adalah apabila memenuhi empat syarat yaitu: *pertama*, negara pusat membuat instruksi pada daerah-daerah atau negara bagian untuk menjalankan syari'at Islam. *Kedua*, negara menciptakan serangkaian undang-undang yang ada di bawah konstitusi tertinggi. *Ketiga*, warganegara harus tunduk dan patuh pada pemerintah. Di sini pemerintah bisa memaksakan kehendak sepanjang masih dalam koridor syari'at Islam. *Keempat*, azas kesetujuan rakyat (*popular consent*) mengandung arti bahwa terbentuknya pemerintah sebagai demikian adalah berdasarkan pilihan rakyat yang bebas dan sepenuhnya mewakili pilihan ini.

Demikian beberapa skripsi yang membahas seputar politik dan Islam, namun dari semuanya tidak ada yang membahas mengenai studi analisis pemikiran andi mappetahang fatwa tentang integrasi politik dan Islam di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian telaah kepustakaan (*library research*) atau dalam bahasa lain dengan melakukan studi kepustakaan. Hal yang sama dijelaskan bahwa *library research* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan buku-buku, pereodikal, naskah-naskah, catatan-catatan, kisah sejarah tertulis, dokumen, dan materi

pustaka lainnya yang terdapat dalam koleksi perpustakaan. Di sini menuntut seorang penulis harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya” tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang dialami dan difikirkan oleh partisan/sumber data.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam konteks penelitian ini yaitu pendekatan Historis-filosofis karena objek material dari penelitian adalah pemikiran tokoh. Kata filsafat berasal dari kata *philo* yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dsb, terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti “adanya” sesuatu.

Pengertian filsafat pada umumnya dikemukakan oleh Sidi Galzaba. Menurut beliau filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik formatnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet. VIII, hlm. 296.

balik yang bersifat lahiriah. Sebagai contoh, kita sering menjumpai berbagai merk pulpen dengan kualitas dan harganya yang berlainan, namun inti semua pulpen adalah sebagai alat tulis.

Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak menukik dari alam idealis kedalam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.

3. Metode pengumpulan data

Penggunaan data di sini adalah untuk memberikan dasar berpikir bukan untuk memberikan hipotesis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan Dokumentasi. Dokumentasi adalah semacam pengawasan dan penyusunan *bibliografi*, yang menggunakan alat-alat seperti seperti indeks, sari karangan dan isei *bibliografi* disamping memakai cara tradisional (klasikal dan katalogisasi), untuk membuat informasi itu dapat dicapai. *Federataion Internationale Decomentation* (FID). Dokumentasi adalah: mengumpulkan menyebarkan dokumen-dokumen dari semua jenis-jenis mengenai semua lapangan pekerjaan manusia Kegiatan dokumentasi melibatkan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pemilihan dokumen sesuai dengan kebutuhan

dokumentasi: memungkinkan isi dokumen dapat di akses: pemrosesan dokumen: mengklasifikasi dan mengideks: menyiapkan penyimpanan dokumen: pencari kembali dan penyajiannya. Pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.

Karena itu panduan utamanya adalah karya-karya Andi Mappetahang Fatwa dan karya tulis ilmiah lain, baik berupa buku, artikel, makalah, atau jurnal yang membahas tentang Andi Mappetahang Fatwa, pendidikan nilai karakter dalam berbagai perspektifnya. Semua itu diperlukan untuk memperkuat dan menganalisis data.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek di mana data diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer ini adalah Andi Mappetahang Fatwa gagasan-gagasan beliau yang tertuang

¹⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, cet. I, hlm. 81.

melalui tulisan di dalam buku, jurnal, majalah, artikel, dan lain-lain, diantaranya :

- 1) *Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- 2) *Islam dan Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1995.
- 3) *Dulu Demi Revolusi, Kini Demi Pembangunan (Eksepsi di Pengadilan)*, YLBHI, Jakarta, Cetakan I, 1985.
- 4) *Menggugat dari Balik Penjara, Surat-surat Politik AM Fatwa*, Prima Netcom Inaya, Bandung, 1999.
- 5) *Demokrasi Teistis*, Gramedia, Jakarta, 2001.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku, majalah, artikel, wawancara serta data-data lain yang dipandang relevan bagi penelitian ini. Diantaranya : C.W. Watson, *Membaca A.M. Fatwa, Perubahan dan Konsistensi*, Blantika (Mizan), 2008. Dan Heyder Affan, Wartawan BBC di Jakarta (orde baru dibenci, orde baru dirindukan), 2013, dan literatur-literatur terkait yang membahas pokok permasalahan yang dikaji

²⁰<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/642-wakil-ketua-mpr-2004-2009>. Diakses pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 pukul 21:19.

F. Metode Analisis Sumber Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *conten analysis* yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Metode *conten analysis* mengindikasikan sejumlah ciri, pertama teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang, kedua proses sistematisasi dan kategorisasi, yakni memproses teks secara sistematis dan kemudian memilah mana yang termasuk suatu kategori dan mana yang tidak termasuk berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, ketiga proses analisa, dalam proses analisa ini haruslah mengarah kepada pemberian sumbangsih dan relevansi teoritis. Dan juga dalam proses ini haruslah mendasarkan pada diskripsi yang dimanifestasikan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala ini tidak sekedar berarti menunjukkan distribusinya, akan tetapi juga termasuk usaha-usaha mengemukakan hubungan satu gejala dengan gejala yang lain didalam aspek-aspek yang tengah diselidiki. Sementara yang dimaksud analitis adalah ikhtiar memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala-gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi suatu gejala, menilai suatu gejala, dan kemudian menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan. Dalam menganalisa data, penulis juga menggunakan metode komparatif deduktif, yaitu mengolah data yang ditemukan dari sumber data baik

primer ataupun skunder yang berkaitan dengan situasi dan faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas dan runtut.

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan umum tentang politik Islam. Bab ini terdiri atas 4 sub bab. Sub bab pertama tentang pengertian politik. Sub bab kedua Islam dan *Civil Society*. Sub bab ketiga pengaruh politik Islam di Indonesia. Sub bab ke empat konsep hubungan politik dan Islam.

Bab III membahas pemikiran Andi Mappetahang fatwa tentang integrasi politik dan Islam. Bab ini terdiri dari atas 4 sub bab. Sub bab pertama tentang biografi Andi Mappetahang Fatwa. Sub bab kedua karya-karya Andi Mappetahang Fatwa. Sub bab ketiga tentang hubungan politik dan Islam menurut Andi Mappetahang Fatwa. Sub ke empat tentang pengaruh pemikiran Andi Mappetahang Fatwa bagi politik di Indonesia.

Bab IV membahas analisis terhadap pemikiran Andi Mappetahang Fatwa tentang Integrasi politik dan Islam di Indonesia. Bab ini terdiri atas 2 sub bab. Sub bab pertama tentang analisis terhadap pemikiran Andi Mappetahang Fatwa tentang integrasi politik dan Islam di Indonesia. Sub bab kedua relevansi terhadap

perkembangan integrasi politik dan Islam di Indonesia menurut Andi Mappetahang Fatwa.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Pada bab ini juga, terdapat saran-saran dan rekomendasi dari penulis.

Adapun pada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.